

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **Analisis Wacana Identitas Islam Berkemajuan Muhammadiyah**

Bab ini akan membahas tentang wacana Islam Berkemajuan Muhammadiyah yang menjadi identitas baru Muhammadiyah abad kedua. Pada bab ini mencoba mencari tahu apa sebenarnya pengertian Islam Berkemajuan itu dan bagaimana Muhammadiyah mengkonstruksi wacana ini menjadi identitasnya sebagai lembaga dan Islam secara umumnya. Pembahasan pada bab ini sendiri akan mengacu pada model analisis wacana kritis Teun Van Dijk yang memadukan antara analisis teks, kognisi sosial dan konteks sosial.

Analisis pada bab ini akan terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama akan menganalisis pengertian Islam Berkemajuan, yang nantinya akan dibagi menjadi beberapa poin sesuai klasifikasi pengertian Islam Berkemajuan tersebut. Tahap kedua adalah analisis mengenai konstruksi wacana Islam Berkemajuan pada teks-teks resmi yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah.

Kedua tahap tersebut akan dianalisis secara holistik, penulis tidak menganalisis elemen-elemen analisis Van Dijk yang terdiri dari teks, kognisi sosial dan konteks sosial tersebut secara satu per satu. Semua elemen analisis wacana kritis Van Dijk tersebut, pada bab ini dianalisis menjadi satu kesatuan di tiap tahapnya.

Karena objek penelitian ini adalah Muhammadiyah secara lembaga, maka sumber-sumber teks yang akan di analisis pada penelitian ini adalah teks-teks dan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah. Baik itu Tanfidz

Keputusan Muktamar, teks-teks yang ada di majalah Suara Muhammadiyah maupun tulisan-tulisan terkait yang ada di website resmi Muhammadiyah ([www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id)).

### **A. Islam Berkemajuan Menurut Muhammadiyah**

Din Syamsuddin dalam pidatonya pada milad ke-40 MUI, mengatakan bahwa Islam Berkemajuan memang benar telah hadir sejak awal berdirinya Muhammadiyah oleh Kyai Dahlan. Pada saat ini Muhammadiyah kembali merevitalisasi karakter ke-Islaman Muhammadiyah itu sendiri, yaitu dengan memunculkan slogan Islam Berkemajuan sebagai aksentuasi dari istilah tersebut. Meskipun diakui bahwa dimensi Islam Berkemajuan merupakan dimensi gerak, tetapi selama itu hanya sekedar aksentuasi, maka cepat atau lambat slogan Islam Berkemajuan ini akan berganti dengan slogan yang lain. Yang bisa jadi lebih mewakili karakter Islam dari Muhammadiyah.

Islam Berkemajuan memperoleh kritik karena seolah-olah Islam itu tidak sempurna sehingga sebagai doktrin komprehensif, masih perlu ditambah dengan gagasan "berkemajuan" dari luar, khususnya dari Barat. Padahal, Islam itu sendiri adalah agama yang sesuai untuk segala zaman dan tempat. Dengan perkataan lain, Islam itu sendiri telah dan selalu modern. Penambahan kata "berkemajuan" di belakang "Islam" seolah melakukan penyempitan makna dari Islam itu sendiri. Seolah Islam adalah agama yang tidak berkemajuan sehingga diperlukan penambahan kata tersebut.

#### **1. Peran Dakwah dan Tajdid**

Pendiri Muhammadiyah sejak awal pergerakannya memelopori Islam yang berkemajuan. Dalam perspektif Muhammadiyah, Islam adalah "agama peradaban" (*din al-hadlarah*) yang diturunkan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan dan terbangunnya peradaban semesta yang berkemajuan. Kemajuan dalam pandangan Islam adalah kebaikan yang

melahirkan keunggulan hidup lahiriah dan ruhaniah. Adapun dakwah dan tajdid bagi Muhammadiyah merupakan jalan perubahan untuk mewujudkan Islam sebagai agama kemajuan bagi kehidupan umat manusia sepanjang zaman. Islam berkemajuan yang melahirkan pencerahan itu merupakan refleksi dari nilai-nilai transendensi, liberasi, emansipasi dan humanisasi sebagaimana terkandung dalam pesan Al-Qur'an (QS. 'Ali Imran: 104 dan 110) yang menjadi inspirasi bagi kelahiran Muhammadiyah.

Deskripsi Islam Berkemajuan yang dasarnya berorientasi pada gerakan Dakwah dan Tajdid dapat kita lihat pada Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, yaitu:

*“secara ideologis, Islam yang berkemajuan merupakan bentuk transformasi Al-Ma'un untuk **menghadirkan dakwah dan tajdid** secara aktual dalam pergulatan hidup keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan universal. Transformasi Islam berkemajuan merupakan perwujudan dari pandangan keagamaan yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan mengembalikan ijtihad di tengah tantangan kehidupan modern abad ke-21 yang sangat kompleks.”<sup>1</sup>*

Darimana kita dapat melihat bahwa gerakan dakwah dan tajdid dalam sejarah pergerakan Muhammadiyah menempati posisi yang cukup mendasar. Hal ini tidak mengherankan jika kita dapat melihat secara historis, sejak berdirinya sampai saat ini Muhammadiyah selalu tampil dan memperlihatkan pembaruan strategi dakwahnya. Yang nantinya akan termanifestasi dalam kebijakan, arah gerak dan keputusan-keputusannya.

Tranformasi dakwah inilah yang penulis kira membuat Muhammadiyah mampu melintasi berbagai zaman tanpa menghilangkan spirit zaman (*zeitgeist*) dimana Muhammadiyah hidup.

---

<sup>1</sup>Lihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 Makassar*, Yogyakarta, 2015, hal 64

Muhammadiyah dalam memasuki abad kedua berkomitmen kuat untuk melakukan gerakan pencerahan sebagai persambungan dari gerakan pembaruan yang dilakukan pada abad pertamanya. Gerakan pencerahan merupakan aktualisasi dari misi dakwah dan tajdid yang bersifat transformatif, yaitu strategi perubahan dinamis yang menekankan pada proses gerakan yang membebaskan, memberdayakan dan memajukan kehidupan masyarakat. Gerakan pencerahan tersebut juga sudah semestinya diwujudkan dalam seluruh lapisan bidang dan lapangan usaha Muhammadiyah, sehingga tidak berhenti dalam pemikiran semata tetapi membumi menjadi gerakan praksis yang mencerahkan kehidupan umat, bangsa dan kemanusiaan universal. Dalam pengembangan dakwah, gerakan pencerahan diaktualisasikan melalui model dakwah pencerahan berbasis komunitas untuk menggarap berbagai kelompok sosial yang heterogen dan berkembang pesat dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini.

Muhammadiyah menyadari pentingnya membangun masyarakat sebagai inti dan fokus gerakannya. Dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah poin kedua secara tegas dinyatakan, bahwa “Hidup manusia bermasyarakat”, yang menunjukkan kesadaran akan posisi dan fungsi masyarakat termasuk di dalamnya komunitas atau jama’ah. Muhammadiyah, bahkan menetapkan tujuannya pada pembentukan masyarakat, yaitu “Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”. Dengan demikian, orientasi ke basis masyarakat, di dalamnya terdapat komunitas atau jama’ah umat, menjadi bagian penting dari ideologi gerakan Muhammadiyah sejak awal gerakan ini lahir hingga perjalanannya melampaui satu abad lebih.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Baca Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Ibid.*, hal 75

Dalam konteks sejarah, Muhammadiyah generasi awal di bawah kepeloporan Kyai Dahlan selaku pendiri dan perintis banyak memelopori usaha-usaha pembinaan komunitas atau jama'ah di masyarakat. Pendiri Muhammadiyah tersebut membentuk dan membina kelompok pengajian seperti Wal Ashri, Fathur Asrar Miftahu Sa'adah, Nurul Iman dan lain-lain. Mendirikan Qismul Arqa, kelompok putra-putri yang dibina di rumah atau di asramanya, dimana Qismul Arqa ini nantinya menjadi embrio lahirnya Madrasah Mu'allimin dan Madrasah Mu'allimat Yogyakarta. Kyai Dahlan dan sahabat-sahabatnya ketika itu juga membina kepeemanduan, yang akhirnya akan melahirkan Hizbul Wathan pada tahun 1918. Membina Siswa Praja sebagai embrio 'Aisyiah tahun 1917.

Melalui spirit Al-Ma'un mengumpulkan anak-anak yatim yang kemudian dilembagakan menjadi *Weeshuis* (Rumah Yatim), *Armenhuis* (Rumah Miskin), dan Poliklinik sebagai benih lahirnya Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO).<sup>3</sup> Kalau kita baca beberapa referensi sejarah mengenai Muhammadiyah, maka kita akan menemukan bahwa Kyai Dahlan juga bergaul dengan kelompok elite di Boedi Oetomo, mengajar di Sekolah Praja, dan berinteraksi dengan siapa saja yang ditemuinya untuk berdialog dan mendakwahkan Islam. Di kediaman HOS Tjokroaminoto misalnya, Kyai Dahlan juga memberikan pengajian Islam yang mencerahkan di hadapan Soekarno, Semaun dan elite muda pergerakan pada masa itu. Perintisan awal Muhammadiyah tersebut menunjukkan usaha-usaha langsung membina kelompok-kelompok khusus dalam masyarakat, yang ini dikenal sebagai komunitas atau jamaah.

---

<sup>3</sup> Yang kini lebih dikenal dengan nama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah

Latar belakang inilah yang nantinya melahirkan model dakwah pencerahan Muhammadiyah yang berbasis komunitas. Dimana Muhammadiyah menganggap strategi dakwah bagi tiap lapisan masyarakat memerlukan perlakuan atau strategi yang berbeda-beda. Termasuk juga lembaga Muhammadiyah yang akan turut andil di dalamnya.

Dakwah pencerahan yang dilaksanakan Muhammadiyah sebagai perwujudan dari gerakan pencerahan memasuki abad kedua sejatinya merupakan dakwah Islam itu sendiri. Dalam Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua misalnya, dinyatakan bahwa:

**“Gerakan pencerahan (tanwir) merupakan praksis Islam yang berkemajuan untuk membebaskan, memberdayakan dan memajukan. Gerakan pencerahan dihadirkan untuk memberikan jawaban atas problem-problem kemanusiaan berupa kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan lainnya yang bercorak struktural dan kultural. Gerakan pencerahan menampilkan Islam untuk menjawab masalah kekeringan ruhani, krisis moral, kekerasan, terorisme, konflik, korupsi, kerusakan ekologis, dan bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan. Gerakan pencerahan berkomitmen untuk mengembangkan relasi sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi, memuliakan martabat manusia baik laki-laki maupun perempuan, menjunjung tinggi toleransi dan kemajemukan, dan membangun pranata sosial yang utama.”<sup>4</sup>**

Penggunaan kata “dihadirkan” dan “menampilkan” pada kalimat tersebut memiliki pesan bahwa sebelumnya memang tidak ada gerakan atau organisasi Islam manapun yang berhasil atau setidaknya berusaha untuk mengatasi masalah-masalah “kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan” dalam konteks Indonesia secara khususnya dan pada makna global secara umum. Kemudian kata “menampilkan” disana memberi kesan bahwa Muhammadiyah adalah wajah

---

<sup>4</sup>Lihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua: Zhawahir Al-Afkar Al-Muhammadiyah Li Al-Qarni Al-Tsani*, Yogyakarta: Gramasurya, 2015, hal

Islam tengahan yang membawa solusi praktis terhadap berbagai permasalahan yang ada. Dengan refleksi bahwa di dunia dan Indonesia khususnya, banyak organisasi atau gerakan Islam yang menyelesaikan masalah dengan cara-cara kekerasan yang akhirnya menjadi tidak mendapat empati dari masyarakat luas dan umat Islam sendiri.

Dari sana kita dapat melihat bahwa dakwah yang dilakukan Muhammadiyah secara esensi, fungsi dan aktualisasinya merujuk pada prinsip dakwah Islam pada umumnya. Dalam pelaksanaan dakwah yang dilakukan Muhammadiyah mempertimbangkan faktor-faktor kondisi sasaran dakwah, sehingga dilakukan secara bertahap sebagaimana contoh dakwah nabi.

Bagi Muhammadiyah, “Model Dakwah Pencerahan berbasis Komunitas” merupakan bentuk aktualisasi dakwah Islam yang diperankan gerakan Islam ini, dengan perhatian atau fokus pada kelompok-kelompok sosial khusus yang disebut “komunitas”. Namun dalam model dakwah ini Muhammadiyah mengembangkan pendekatan dan strategi yang lebih relevan untuk menghadapi berbagai komunitas yang berkembang di masyarakat sesuai dengan karakternya masing-masing.

Hal ini dapat kita lihat kembali pada Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47, yaitu: **“Pendekatan dan strategi dakwah tersebut difokuskan pada kelompok-kelompok masyarakat yang tergolong dalam komunitas”**

Adapun yang dimaksud dengan “komunitas” pada teks tersebut adalah kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat yang memiliki sifat atau karakter tertentu yang spesifik. Komunitas berasal dari bahasa latin “communitas” dan dalam bahasa inggris “community”, yang berarti “kesamaan”. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan,

umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam suatu komunitas, para individu yang hidup di dalamnya memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, resiko, kegemaran dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Relasi dan pola hidup komunitas pada umumnya homogen, yang terdiri atas berbagai kelompok, sehingga dapat di jumpai heterogenitas komunitas yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Secara sosiologis, komunitas menunjukkan sekumpulan orang dengan struktur sosial tertentu, rasa kepemilikan atau semangat komunitas, dan atau berada pada lokasi geografis tertentu. Secara antropologis kehidupan komunitas memiliki kekhasan dan identitas yang kuat, sehingga memiliki sifat komunal seperti dijumpai pada komunitas-komunitas etnik, keagamaan, dan lain-lain. Dalam perkembangan mutakhir, konsep komunitas digunakan untuk menandai rasa identitas tertentu yang mungkin terikat atau tidak terikat pada lokasi geografis. Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dan postmodern yang memunculkan rasa identitas baru tertentu seperti halnya sosial media, maka konsep komunitas makin menunjukkan relasi kehidupan antar manusia yang bersifat komunitas maya (*cyber community*) yang memiliki relasi sosial yang spesifik. Komunitas terakhir tersebut juga disebut sebagai *Virtual Community* atau komunitas virtual.

Bagi Muhammadiyah, baik komunitas yang bersifat konvensional (terikat lokasi) maupun nonkonvensional (tidak terikat lokasi) merupakan lokasi merupakan arena atau ranah dakwah yang memerlukan pencerahan. Komunitas atau jamaah itu baik dalam makna eksklusif menyangkut komunitas umat Islam maupun inklusif mencakup kelompok masyarakat luas. Kedua komunitas atau jamaah tersebut merupakan sasaran dakwah yang memiliki tatanan sendiri yang



memerlukan proses spesifik dalam menghadapinya. Karenanya, konsep komunitas dalam Muhammadiyah memiliki kesamaan dengan konsep jamaah, baik jamaah dalam makna khusus sekelompok orang Islam yang memiliki identitas yang sama maupun jamaah dalam makna kelompok masyarakat umum yang keduanya merupakan sasaran dakwah.<sup>5</sup>

Dakwah Komunitas adalah sebuah konsep dan strategi dakwah yang disusun sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan komunitas yang menjadi objek dakwahnya. Misalnya, untuk kalangan masyarakat menengah-atas yang secara ekonomi mapan dan memiliki latar belakang pendidikan yang relatif tinggi, kebutuhan mereka akan identitas sosial-keagamaan berbeda dengan kelompok kelas menengah-bawah. Pemahaman dan interpretasi kelas-menengah terhadap konsep-konsep dasar keagamaan Islam yang menjadi pegangan mereka juga berbeda. Boleh jadi kelompok kelas menengah-atas lebih kosmopolit, dan melihat fungsi agama sebagai pendorong untuk melakukan amal kebajikan dalam ranah sosial, ekonomi dan politik lebih luas. Sementara itu, di masyarakat kalangan menengah-bawah, keberislaman menjadi bagian upaya untuk meningkatkan spirit dan ethos kerja agar memperbaiki taraf hidup. Bagi kelompok marjinal, Islam menjadi sarana perjuangan untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka sebagai warga negara yang telah diabaikan oleh negara.

“Dakwah Komunitas menggunakan prinsip-prinsip GJDJ dengan pengayaan konsep, pemikiran, pendekatan, strategi, metode, pelaksanaan yang lebih bervariasi sesuai dengan ragam komunitas yang menjadi sasaran dakwah”.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Baca selengkapnya di Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Model Pencerahan Berbasis Komunitas*, Yogyakarta, 2015

<sup>6</sup>Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Op.cit.*, hal 84

Kata “dengan” pada kalimat diatas menunjukkan koherensi kondisional dari perkembangan cara dan konsep dakwah di Muhammadiyah. Ini dikesankan agar kita maknai sebagai bentuk pembaruan Muhammadiyah. Setelah pemaknaan itu kemudian akan dengan sendirinya Muhammadiyah terkonstruksi sebagai gerakan Islam yang berkemajuan. Dalam hal ini berkemajuan dalam hal berfikir dan penggunaan metode dakwahnya. Hal ini juga sebagai bentuk penyesuaian Muhammadiyah dengan kondisi zaman saat ini, yang tentunya sangat berbeda secara sosial ketika masa konsep atau metode GJDJ dibuat.

Karena itu konsep “Model Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas” atau Dakwah Komunitas yang dikembangkan Muhammadiyah harus dimaknai sebagai bentuk dakwah yang fleksibel dan dinamis, yang tidak hanya menyampaikan pesan keagamaan melainkan juga disertai aktivisme yang bersifat praksis. Seperti menerjemahkan pesan dan misi dakwah yang sesuai dengan sasaran dakwah agar penyampaiannya dapat di terima oleh komunitas yang sedang didakwahkan, membangkitkan solidaritas dengan memobilisasi dan mengorganisasi komunitas tersebut agar lebih dinamis, hal ini pula yang akan kembali membangkitkan *ghirah* peradaban Islam di Indonesia.

Bisa juga dibilang bahwa konsep Dakwah Komunitas ini adalah bentuk pengembangan dakwah Muhammadiyah dari “Dakwah Jamaah” atau yang sering disebut Gerakan Jamaah Dakwah Jamaah (GJDJ). Karena Dakwah Komunitas secara essensi dan fungsinya sama dengan Dakwah Jamaah. Bentuk pengembangan model dakwah ini yang diformulasikan kembali dalam era kekinian ketika Muhammadiyah memasuki abad kedua. Kandungan maknanya sama, yaitu sebagai wujud kegiatan dakwah dengan model gerakan jamaah untuk berbagai kelompok komunitas yang bertujuan menyebarluaskan dan mewujudkan

ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat sehingga terbentuk “Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya” sebagaimana cita-cita ideal Muhammadiyah.

## **2. Peran Kebangsaan**

Dalam pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-47 pada 3 Agustus 2015 lalu di Makassar, Din Syamsuddin menjelaskan bagaimana peran kebangsaan Muhammadiyah selama ini. Sekaligus juga menjelaskan integrasi antara visi Islam Berkemajuan dan ke-Indonesiaan. Dalam hal ini Prof. Din Syamsuddin menggunakan terma “Dar Al-Ahdi Wa Al-Syahadah” sebagai pernyataan atas Negara Pancasila, yang artinya Negara Pancasila adalah negara kesepakatan dan negara kesaksian.

“dengan tema Muktamar ini, Muhammadiyah ingin mengukuhkan sikap dan pandangan dan komitmen terhadap Indonesia tercinta, negara yang ikut didirikan oleh Muhammadiyah, dan bahkan Muhammadiyah terlibat bahkan jauh sebelum negara ini hadir,... inilah komitmen Muhammadiyah kepada negara bangsa, negara pancasila yang kita cintai ini. Yang dalam Muktamar ini ingin kita kukuhkan lagi, Negara Pancasila sebagai Dâr Al-Ahdi Wa Al-Syahâdah, negara kesepakatan dan negara kesaksian. Dalam arti bahwa Muhammadiyah memiliki komitmen tinggi dengan negara pancasila untuk mencapai cita-cita nasional yang telah diletakkan oleh pendiri bangsa ini.”<sup>7</sup>

Kata “inilah komitmen Muhammadiyah” pada pidato tersebut dijadikan konjungsi yang membentuk sebab akibat. Bentuk dan susunan kata semacam itu memberi kesan positif bahwa Muhammadiyah adalah sebuah gerakan Islam yang turut berjuang demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia dan menentang siapa saja yang ingin membubarkan NKRI.

Tidak mengherankan kiranya jika kita kembali melihat bagaimana peran Muhammadiyah dalam histori kemerdekaan Indonesia. Tiga tokoh penting

---

<sup>7</sup> Lihat pidato pembukaan Muktamar oleh Din Syamsuddin dalam Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47, hal 138

Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusumo, Prof. Kahar Muzakir dan Kasman Singodimedjo bersama para tokoh bangsa lainnya telah berperan aktif dalam Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, untuk merumuskan prinsip dan bangunan dasar negara Indonesia. Ketiga tokoh tersebut kita ketahui bahwa mereka turut bersama tokoh lainnya dalam merumuskan dan menandatangani lahirnya Piagam Jakarta yang menjiwai Pembukaan UUD 1945.

Muhammadiyah memandang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang di proklamasikan 17 Agustus 1945 adalah Negara Pancasila yang ditegakkan atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; secara esensi selaras dengan nilai-nilai Islam yang dikenal dengan *Al Maqashid Al Syari'ah*. Negara pancasila dalam pandangan Muhammadiyah sesungguhnya mengandung jiwa, pikiran dan cita-cita luhur sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 itu dapat diaktualisasikan sebagai *Baldatun Thayyibatu Wa Rabbun Ghafur* yang berkehidupan maju, adil, makmur, bermartabat dan berdaulat dalam naungan ridha Allah SWT. Bahwa Pancasila merupakan hasil konsensus nasional (dâr al-'ahdi) dan tempat pembuktian atau kesaksian (dâr al-syahâdah) untuk menjadi negeri yang aman dan damai (dâr al-salâm).

Muhammadiyah juga memandang bahwa segenap umat Islam harus berkomitmen menjadikan Negara Pancasila sebagai dâr al-syahâdah atau tempat bersaksi dan pembuktian diri dalam mengisi dan membangun kehidupan kebangsaan. Dalam Negara Pancasila sebagai dâr al-syahâdah, umat Islam harus

siap bersaing untuk mengisi dan memajukan kehidupan bangsa dengan segenap kreasi dan inovasi (tajdid) yang terbaik. Dalam hal ini, Muhammadiyah sebagai komponen strategis umat dan bangsa mempunyai peluang yang besar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Pernyataan tersebut bukan menjadi sesuatu yang kosong jika kita melihat bagaimana perkembangan strategi dakwah Muhammadiyah melalui organisasi otonomnya berikut pula dengan amal usahanya. Yang telah banyak sekali mengisi sekat-sekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengaruhnya dari kalangan elitis sampai akar rumput masyarakat pun ada. Maka bukan sesuatu yang tidak mungkin jika Muhammadiyah adalah salah satu komponen paling strategis dalam mewujudkan Negara Pancasila atau Dâr Al-Syahâdah.

### **3. Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan**

Jika membaca secara keseluruhan histori Muhammadiyah sejak awal berdirinya, baru pasca reformasi Muhammadiyah mulai menampilkan diri sebagai “warga dunia”. Dengan membawa visi “Islam Berkemajuan”, Muhammadiyah ingin menampilkan kesan bahwa peradaban Islam di Indonesia sesungguhnya tidak kalah menarik dari peradaban Islam di Timur Tengah.

Dalam Tanfidz ke-47, Muhammadiyah berusaha mengintegrasikan antara Islam dan Indonesia untuk menjadi satu visi yang kosmopolitan, berikut kalimatnya:

“Islam Indonesia yang berkemajuan memiliki wawasan kosmopolitanisme. **Islam Indonesia Berkemajuan merupakan alternatif masa depan Negara Pancasila ditengah pusaran dunia yang dinamis dan progresif.** Tanpa Islam Berkemajuan maka Indonesia akan tetap

menjadi negara sedang berkembang, berbudaya tradisional yang tertinggal, serta tidak akan menjadi negara-bangsa yang unggul di kancah dunia”<sup>8</sup>

Dilihat dari kalimat yang di tekankan diatas, secara eksplisit dapat dilihat bahwa Muhammadiyah mengklaim kelompoknya sebagai gerakan pembaruan yang turut memperjuangkan kemajuan Indonesia serta berani tampil di kancah dunia sebagai sebuah peradaban baru. Ini dapat kita lihat dari pilihan kalimat berupa koherensi kondisional yang digunakan pada kalimat, “Tanpa Islam Berkemajuan maka Indonesia akan tetap menjadi negara sedang berkembang, berbudaya tradisional yang tertinggal, serta tidak akan menjadi negara-bangsa yang unggul di kancah dunia”. Kalimat tersebut sekaligus sebagai justifikasi kepada kelompok Islam lainnya yang masih memelihara budaya kejawaan dan tradisional yang sebenarnya menjadi penghambat berkembangnya Indonesia sebagai negara-bangsa. Yang akhirnya mengesankan bahwa Islam adalah ajaran agama yang kolot dan tidak maju, menolak peradaban modern dan sebagainya.

Maka pada pernyataan tersebut pula jelas bahwa Muhammadiyah menegaskan visi Islam Berkemajuan sebagai salah satu alternatif dari stagnasi peradaban Islam. Bahwa seharusnya Islam sebagai *role model* dari berbagai peradaban modern, bukan mengikuti dan menjadi konsumen dari seluruh hasil dari peradaban modern ini. Umat Islam harus menyadari bahwa menjadi umat yang maju dan memajukan adalah perintah agama. Menjadikan *modern* adalah bukan berarti *western*.

Hal ini juga sekaligus sebagai bentuk defensif Muhammadiyah dari golongan yang memandang Islam menggunakan satu perspektif, yaitu radikalisme. Yang akhirnya memunculkan pandangan Islamophobia di beberapa

---

<sup>8</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Op.cit.*, hal 72

negara, terutama di nagara-negara Eropa. Bagaimana diskriminasi dan intimidasi yang dialami oleh muslim disana. Bahkan tidak sedikit yang mengakui bahwa Muhammadiyah sendiri justru radikal dalam hal tertentu. Radikalisme yang dilekatkan kepada Muhammadiyah barangkali bukan terma radikal dalam hal kekerasan fisik, tapi lebih kepada intelektual dan pemikirannya.

Dalam pandangan tersebut, Muhammadiyah sebenarnya ingin agar umat Islam menjalankan peran-peran strategis dalam membawa Indonesia menjadi negara dan bangsa berkemajuan. Umat Islam harus tampil sebaga perekat integrasi nasional yang menampilkan Islam Indonesia berwatak tengahan (*wasathiyyah*) yang damai, santun dan toleran.

Dalam ranah kemanusiaan universal masih terdapat sejumlah masalah yang meniscayakan keprihatinan seluruh kekuatan dunia. Masalah-masalah krusial yang bersifat mondial inilah yang menjadi titik tekan Muhammadiyah dalam memandang permasalahan global, ini dapat kita lihat misalnya pada Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua, yaitu:

“adalah krisis kemanusiaan modern, kemiskinan sejumlah negara sedang berkembang di tengah melimpahruahnya kemakmuran negara-negara maju, krisis pangan dan energi, krisis ekonomi khususnya keuangan dan fiskal, krisis lingkungan dan perubahan iklim, migrasi global, dan yang berkaitan dengan relasi antarperadaban. Masalah lain ialah terorisme internasional, ketidakadilan politik dan standar ganda yang dilakukan negara-negara maju terhadap negara-negara sedang berkembang, dan secara khusus masalah Islamofobia yang dihadapi umat Islam di negara-negara Barat yang berlangsung masif dan sistematis.”<sup>9</sup>

Keseluruh masalah yang disebutkan pada kalimat diatas sesungguhnya merujuk pada satu makna, yaitu ketertindasan masyarakat global dari sistem dunia yang tidak adil. Hal ini dapat kita lihat pada kalimat “kemiskinan sejumlah

---

<sup>9</sup> Lihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua*, Yogyakarta, 2015, hal 5

negara sedang berkembang di tengah melimpahnya kemakmuran negara-negara maju” dan “ketidakadilan politik dan standar ganda yang dilakukan negara-negara maju terhadap negara-negara sedang berkembang”. Muhammadiyah menyadari bahwa hal ini merupakan kezaliman yang nyata. Sebagai bagian dari warga dunia, Muhammadiyah merasa perlu mengambil peran yang strategis dalam penyelesaian konflik-konflik atau masalah yang menyoal relasi antar bangsa.

Dalam hal ini pula kita mengetahui bahwa keberpihakan Muhammadiyah memang jelas kepada siapa, yaitu kepada masyarakat dunia yang mengalami diskriminasi, intimidasi serta penindasan baik secara fisik maupun non fisik. Inilah komitmen Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang memaknai diri sebagai kelompok yang tengahan (*wasathiyah*), dapat kita lihat pada kalimat berikut:

“Dalam gerak melintasi zaman dari abad kesatu ke abad kedua dan dalam menghadapi masalah-masalah keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal yang sangat kompleks itu **Muhammadiyah berkomitmen kuat untuk menjadi bagian dari penyelesai masalah (*problem solver*)** dengan mengambil prakarsa, partisipasi, dan langkah-langkah yang proaktif dan strategis.”<sup>10</sup>

Pada dua anak kalimat “dalam gerak melintasi zaman dari abad kesatu ke abad kedua **dan** dalam menghadapi masalah-masalah keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal yang sangat kompleks” tersebut dapat kita lihat penggunaan konjungsi “dan” yang ditekankan diatas, dipakai untuk menghubungkan dua fakta yang berbeda, yang nantinya akan menjadi latar Muhammadiyah memposisikan diri sebagai “*problem solver*”.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal 5



Pada anak kalimat yang ditekankan diatas mengesankan Muhammadiyah sebagai “salah satu” elemen dunia yang harus turut dalam menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan secara universal. Ini akan mencitrakan Muhammadiyah adalah gerakan yang memang sudah besar karena arah geraknya tidak lagi terpaut pada dimensi ruang<sup>11</sup>, tetapi lebih kepada dimensi gerak. Yang artinya menggerakkan kehidupan umat dan bangsa sebagai manifestasi dari pikiran Islam yang Berkemajuan.<sup>12</sup>

Sebenarnya tidak mengherankan jika Muhammadiyah akhirnya mengambil langkah turut serta dalam percaturan global sebagai *problem solver* jika kita melihat bagaimana sejarah Muhammadiyah. Dimana para ideolog dan pemikir-pemikir Muhammadiyah sepanjang zaman adalah mereka yang pernah belajar pada dunia barat atau timur tengah.

Secara sosio-historis, Muhammadiyah lahir di era kolonialisme dengan interaksi antar-bangsa baik pribumi, Eropa, Cina, dan Arab, yang membentuk persatuan nasional. Para perintis Muhammadiyah generasi awal memiliki wawasan dan pergaulan budaya yang bersifat kosmopolit yang berinteraksi dengan orang-orang asing dari Eropa, Turki, Arab, Cina, India, dan lain-lain. Secara intelektual pendiri dan tokoh Muhammadiyah berinteraksi dengan pikiran-pikiran maju dari Timur Tengah dan Barat, yang membentuk dan memperluas cakrawala kosmopolitan. Secara ideologis Muhammadiyah merupakan gerakan Islam modernis yang banyak mengadopsi perangkat, metode,

---

<sup>11</sup> Pada konteks ini adalah ranah ke-Indonesiaan

<sup>12</sup> Lihat pidato pembukaan Din Syamsuddin pada pembukaan Muktamar ke-47.

dan unsur-unsur modernisme Barat sebagai embrio sikap kosmopolitan tanpa terjebak pada pembaratan.

## **B. Konstruksi Wacana Islam Berkemajuan**

### **1. Rekonstruksi pemahaman Manhaj Muhammadiyah**

Belakangan pasca Muktamar ke-47 tahun 2015 di Makassar, tersebar istilah Manhaj Muhammadiyah. Manhaj Muhammadiyah adalah sistem pemikiran yang di dalamnya terkandung pokok-pokok gagasan tentang keyakinan, pemikiran dan tindakan. Secara sederhana, Manhaj Muhammadiyah ini adalah kumpulan pemikiran ideologis dari Muhammadiyah sepanjang didirikannya. Sistem pemikiran ideologis inilah yang memberikan spirit dan arah bagi gerakan Muhammadiyah. Sebagai pemikiran ideologis yang telah menginisiasi, melahirkan, menggerakkan, dan mengembangkan, Manhaj Muhammadiyah menjadi pengetahuan pokok bagi setiap pimpinan dan kader Muhammadiyah.<sup>13</sup>

Seperti yang dituliskan pada Suara Muhammadiyah edisi ke-13 tahun 2017, bahwa:

“disinilah pentingnya internalisasi pemikiran dan gerakan Muhammadiyah bagi warga Muhammadiyah sendiri”<sup>14</sup>

Elemen tematik pada teks diatas adalah soal “internalisasi manhaj Muhammadiyah”. Pilihan kata “pemikiran” dan “gerakan” tersebut juga dapat dimaknai sebagai bagaimana ideologi dan arah gerak Muhammadiyah dapat dipahami oleh seluruh elemen warga Muhammadiyah. Skema struktur kalimat dimana “pemikiran” lebih dulu diletakkan dibanding “gerakan” menunjukkan

---

<sup>13</sup>Pembahasan ini telah penulis bahas pada bab.2 penelitian ini.

<sup>14</sup>Lihat Suara Muhammadiyah, *Manhaj Muhammadiyah*, edisi ke-13/102, 2017, hal 9

sikap Muhammadiyah yang bergerak selalu memiliki landasan ideologis dan filosofis. Ini tidak lepas dari citra Muhammadiyah sebagai gerakan Islam tentunya, yang mengajarkan setiap perbuatan harus memiliki alasannya.

Pada teks lain, Muhammadiyah menunjukkan sikap atau keseriusannya dalam proses internalisasi manhaj ini:

“MPK PP Muhammadiyah saat ini telah memproses lahirnya 5000 instruktur (ideolog) agar mempercepat proses ideologisasi dan internalisasi manhaj Muhammadiyah.”<sup>15</sup>

Kesan keseriusan Muhammadiyah dapat jelas sekali kita lihat pada penggunaan konjungsi “agar” sebagai koherensi kondisional antar dua anak kalimat tersebut. Artinya bahwa demi mempercepat proses internalisasi ideologi Muhammadiyah, maka Muhammadiyah melalui MPK PP-nya sedang memproses 5000 ideolog yang siap diterjunkan ditengah masyarakat Muhammadiyah. Hal ini dilakukan Muhammadiyah demi pengintegrasian dari hulu ke hilirnya.

Elemen maksud pun dapat kita lihat pada detil informasi “lahirnya 5000 instruktur”, hal ini sebagai bentuk pencitraan positif yang subjektif dari Muhammadiyah sendiri. Sekali lagi ini sebagai bentuk penegasan tentang seriusnya Muhammadiyah dalam merekonstruksi Manhaj Muhammadiyah.

Dr. Haedar Nashir, MSi, ketua umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020 dalam tulisannya yang berjudul “Manhaj dan Komitmen Bermuhammadiyah”, menjelaskan bahwa Muhammadiyah pada dekade mutakhir telah mengalami dan menghadapi dinamika kehidupan keagamaan dan kebangsaan yang begitu kompleks. Sejak reformasi, berkembang luas organisasi dan aliran keagamaan di lingkungan umat Islam dengan berbagai kecenderungan

---

<sup>15</sup> Suara Muhammadiyah, *Loc.cit*,

paham yang heterogen. Di dalamnya terdapat orientasi paham yang kontras antara yang bercorak “*fundamentalistik*” atau “*konservatif*” hingga yang “*liberal-sekuler*”, di samping yang “*moderat*”. Bertumbuh pula kesadaran politik Islam yang menguatkan Islamisme dengan beragam artikulasi melalui partai politik Islam maupun gerakan politik non-partai, yang sering disebut oleh Oliver Roy sebagai “*neofundamentalisme*” seperti Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir. Perkembangan baru tersebut selama sekitar 19 tahun pasca reformasi telah memberi pengaruh tertentu dalam alam pikiran umat Islam Indonesia. Termasuk juga di lingkungan organisasi-organisasi Islam yang dikenal arus utama seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam dan Nahdlatul Ulama, serta gerakan Islam lainnya dengan coraknya masing-masing.

Pada tulisannya tersebut, Haedar Nashir mengatakan sekaligus sebagai penekanan soal pentingnya internalisasi Manhaj Muhammadiyah sebagai berikut:

“Manhaj gerakan yang terkandung dalam pikiran-pikiran resmi organisasi semestinya dipahami, dipegang dan dijadikan rujukan utama dalam menentukan posisi dan peran Muhammadiyah dalam konteks keummatan, kebangsaan dan perkembangan global; termasuk yang harus dipedomani oleh seluruh anggota Muhammadiyah tanpa terkecuali. Manhaj-lah yang menjadi koridor berpikir dan bertindak, sedangkan anggota menyesuaikan diri dan harus berada dalam bingkai Manhaj Muhammadiyah tersebut.”<sup>16</sup>

Leksikon pada kata “semestinya” digunakan sebagai bentuk penegasan kepada seluruh elemen warga Muhammadiyah. Kata tersebut juga sekaligus menjelaskan bahwa kemarin dan saat ini, Manhaj atau pikiran resmi organisasi tersebut belum “dipahami, dipegang dan dijadikan rujukan utama” oleh banyak elemen yang ada di Muhammadiyah. Baik itu struktural ataupun kultural yang ada di akar rumput. Koherensi antar kalimat tersebut pada intinya menempatkan

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hal 15

“Manhaj Muhammadiyah” sebagai rujukan teknis seluruh elemen Muhammadiyah dalam berfikir, bertindak dan berperan.

Dalam kehidupan kebangsaan Muhammadiyah mengagendakan revitalisasi visi dan karakter bangsa, serta semakin mendorong gerakan mencerdaskan kehidupan bangsa yang lebih luas sebagaimana cita-cita kemerdekaan. Dalam menghadapi berbagai persaingan peradaban yang tinggi dengan bangsa-bangsa lain dan demi masa depan Indonesia yang lebih maju maka diperlukan transformasi mentalitas bangsa ke arah pembentukan manusia Indonesia yang berkarakter kuat. Manusia yang berkarakter kuat dicirikan oleh kapasitas mental yang membedakan dari orang lain seperti keterpercayaan, ketulusan, kejujuran, keberanian, ketegasan, ketegaran, kuat dalam memegang prinsip, dan sifat-sifat khusus lainnya yang melekat dalam dirinya. Sementara nilai-nilai kebangsaan lainnya yang harus terus dikembangkan adalah nilai-nilai spiritualitas, solidaritas, kedisiplinan, kemandirian, kemajuan, dan keunggulan.<sup>17</sup>

Upaya rekonstruksi Muhammadiyah terhadap pikiran ideologisnya ini bukan tanpa alasan yang jelas tentunya. Ini dilakukan dengan dasar atas akumulasi peristiwa yang terjadi pada hampir dua dekade terakhir. Dimana perkembangan dan penyebaran ideologi baru yang dapat mengancam warga Muhammadiyah, globalisasi yang makin hari makin sulit untuk dibendung, serta peristiwa-peristiwa politik kebangsaan di Indonesia.

Rekonstruksi Manhaj ini dapat kita maknai bukan hanya sebagai upaya pembaruan Muhammadiyah abad kedua, tetapi juga sebagai bentuk

---

<sup>17</sup> Dapat di baca selengkapnya di *Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua*

*defensive* Muhammadiyah dari pemikiran-pemikiran “luar” yang dapat mengganggu internal Muhammadiyah.

Upaya membendung ini dilakukan Muhammadiyah tidak lain adalah demi memantapkan langkah untuk menampilkan identitasnya sebagai gerakan Islam yang berkemajuan. Dalam arti membuat seluruh warga Muhammadiyah memiliki satu frame kepaahaman yang sama tentang pemikiran dan arah gerak Muhammadiyah.

## **2. Peran Kebangsaan Muhammadiyah**

Dalam fase abad kedua, Muhammadiyah mengaku akan senantiasa aktif menjalankan jihad kebangsaan sebagai aktualisasi dakwah dan tajdid pencerahan dengan melakukan peran-peran konstruktif dalam meluruskan kiblat bangsa. Jihad konstitusi yang selama ini dilakukan Muhammadiyah merupakan bagian dari jihad kebangsaan agar segala kebijakan negara dengan seluruh instrumennya benar-benar sejalan dengan jiwa, pemikiran, filosofi dan cita-cita nasional sebagaimana diletakkan oleh para pendiri bangsa. Muhammadiyah senantiasa mengutamakan kepentingan dan kemajuan bangsa diatas segalanya serta membawa misi kebangsaan agar Indonesia dibangun secara bertanggungjawab dan tidak boleh ada kebijakan-kebijakan maupun tindakan-tindakan yang membawa kerusakan di dalamnya. Melalui berbagai amal usaha, serta bekerjasama dengan pemerintah dan seluruh komponen bangsa, kiprah nyata Muhammadiyah harusnya akan sejalan dengan Khittah dan Kepribadiannya menuju Indonesia Berkemajuan.

Muhammadiyah, dalam mengkonstruk dan merepresentasikan diri sebagai Gerakan Islam Berkemajuan sebenarnya telah dimulai sejak organisasi ini di

dirikan. Walaupun spirit Islam Berkemajuan ketika awal berdirinya baru sebatas nilai dan belum menjadi identitas, tetapi justru nilai inilah yang membuat Muhammadiyah dalam perjalanannya memegang teguh spirit berkemajuan sampai saat ini.

Dalam satu edisi majalah Suara Muhammadiyah<sup>18</sup>, Haedar Nashir menulis, *“Muhammadiyah dengan ideologi Islam yang berkemajuan bahkan dapat menawarkan pemikiran-pemikiran Islam alternatif yang lebih bercorak humanitarian dan kultural, dengan pandangan-pandangan dan tampilan-tampilan yang lebih lembut.”*

Dengan kata lain, Muhammadiyah telah berjasa besar dalam “mendinginkan” corak keislaman yang khas nusantara, —atau dalam bahasa Haedar Nashir, lebih bercorak humanitarian dan kultural.

Satu perspektif penting yang hendak penulis bahas disini adalah bahwa kontribusi persyarikatan ini mempunyai sifat kontinuitas, yaitu kemampuan untuk selalu memberikan peran kesejarahan yang bersifat futuristik tidak saja bagi dirinya sendiri namun juga bagi lingkungannya yang lebih luas. Peran kesejarahan tersebut berarti bahwa Muhammadiyah selalu memberikan torehan tinta penting dalam setiap episode perjalanan bangsa dan negara. Dalam tulisan ini, penulis membagi kurun kesejarahan tersebut dalam enam era: kolonial, kemerdekaan, orde lama, orde baru, reformasi dan pasca reformasi.

**Era Kolonial**, sisi humanitarian persyarikatan ini telah ditegaskan oleh Bapak Pendiri Muhammadiyah, KHA Dahlan, melalui pengamalan surat Al Ma’un (surat ke 107) dalam bentuk aksi nyata ke tengah-tengah masyarakat. Dalam semangat surat ini, keimanan jelas dikaitkan dengan tanggungjawab sosial (*social responsibility*) yang mengarah pada karakter progresifitas. *“Dadijo kjai*

---

<sup>18</sup> Suara Muhammadiyah, edisi ke-18/96, 2011, hal 13

*sing kemadjoean odjo kesel anggonmu njamboet gawe kanggo Muhammadiyah,*”<sup>19</sup> begitu pesan KHA Dahlan saat itu.

Pesan dalam kalimat pendek ini memiliki makna yang amat dalam dan berimplikasi luas untuk mengubah *mindset* yang lebih terbuka menuju umat yang beradab dan bermartabat. Misalnya, dalam beribadah pun orang Islam harus berwawasan maju, tidak bersikap taklid tetapi berdasarkan pada pengetahuan dan pemahaman syariat yang benar. Dalam membangun kesejahteraan umat tidak perlu anti terhadap kemajuan yang dicapai oleh bangsa Barat. Perubahan arah kiblat sholat dan penyelenggaraan pendidikan Islam dengan menggunakan model pendidikan Barat merupakan contoh-contoh praktis perubahan pola pikir yang berkemajuan dari Kyai Dahlan.

Contoh lain menurut catatan KH. Muhammad Soedja’, pada masa itu ada beberapa kejadian atau upaya penting yaitu (1) Timbulnya penyiaran agama oleh para mubalighin dan mubalighat; (2) Penyiaran agama Islam melalui perpustakaan dengan mendirikan Taman Pustaka, (3) Timbulnya aksi untuk pertolongan umum yang diberi nama Penolong Kesengsaraan Oemoem terhadap orang miskin dan anak yatim, penderita yang sengsara, (4) Berdirinya Sopo Tresno yang kemudian menjadi Aisyiyah, dan (5) Terbentuknya bagian Penolong Haji. Kesemuanya ini berangkat dari satu kesadaran kolektif yang dibangun oleh

---

<sup>19</sup>Sebenarnya referensi autentik dari pernyataan Kyai Dahlan ini masih belum ditemukan. Referensi yang dirujuk oleh penulis adalah MT. Arifin, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah Dalam Bidang Pendidikan: Reformasi Gagasan dan Teknik*, Surakarta: Bagian Penalaran, Lembaga Pembinaan Mahasiswa UMS, 1985, hal 74



KHA Dahlan untuk menegakkan ajaran agama Islam yang sebenar-benarnya, yaitu agama yang mampu membawa kebahagiaan di dunia maupun akhirat.<sup>20</sup>

**Era Kemerdekaan,** Pada masa ini pula, Muhammadiyah melalui kepemimpinan KH Mas Mansyur melakukan sebuah gebrakan di bidang ekonomi, yaitu dengan memisahkan riba' dengan bunga bank yang tidak menimbulkan kemudharatan. Terobosan ini menjadi sangat penting mengingat pada saat itu sistem perbankan masih dianggap tabu oleh sebagian besar umat Islam, padahal kemajuan perkenomian modern tidak bisa melepaskan diri dari sistem perbankan.

Sedangkan di bidang politik, sumbangan Muhammadiyah dilakukan melalui tokoh-tokohnya, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Kahar Muzakkir dan Kasman Singodimejo yang menjadi anggota Panitia Sembilan, yang merumuskan dasar resmi negara untuk pertama kali. Pada saat opsir Jepang mewakili Indonesia bagian Timur minta penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta yang sudah disepakati untuk pembukaan UUD 1945, dan mengancam akan memisahkan diri dari Negara RI, maka Ki Bagus Hadikusuma merumuskan sila pertama tersebut dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu, Kasman Singodimejo bahkan adalah Ketua KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) atau cikal bakal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sekarang. Sedemikian besar peranan ketiga tokoh ini, sehingga ketiganya diusulkan oleh Muhammadiyah melalui Panitia Pengusulan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional, yang diketuai AM Fatwa September tahun 2012 lalu, sebagai Pahlawan Nasional.

---

<sup>20</sup> Kyai Syuja', *Islam berkemajuan: kisah perjuangan K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah masa awal : Kyai Ahmad Dahlan dalam catatan pribadi Kyai Syuja, murid K.H. Ahmad Dahlan*, Al Wasat Publishing House, 2009

**Orde Lama**, ini adalah masa yang penuh ketegangan antara Muhammadiyah dan pemerintahan Soekarno<sup>21</sup>. Karena ketegangan inilah, Muhammadiyah sangat hati-hati dalam gerakannya sehingga secara pergerakan, Muhammadiyah tidak terlalu banyak melakukan aktivitas organisasi.

Saat itu bangsa terbelah dalam tiga golongan atau kelompok besar, yaitu kaum agamis, nasionalis dan komunis (NASAKOM), sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Bung Karno untuk menyatukan semua paham kebangsaan di Indonesia. Alih-alih bersatu, ketiga golongan besar ini justru saling bersaing memperebutkan pengaruh dan kekuasaan politik yang berpotensi untuk mengancam integrasi bangsa. Pada saat itu, KH Ahmad Badawi diangkat oleh Bung Karno sebagai Penasehat Presiden untuk Urusan Agama. Di bawah bayang-bayang ancaman PKI, KHA Badawi berhasil meyakinkan Bung Karno untuk tidak membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Muhammadiyah yang saat itu dihasut PKI sebagai organisasi pendukung utama Masyumi, saingan terberat PKI.<sup>22</sup>

Selain itu, bersama komponen agamis dan nasionalis lainnya, Muhammadiyah melalui KHA Badawi kala itu berhasil membendung bahkan meruntuhkan cengkaman PKI yang berhasrat kuat untuk meruntuhkan sila pertama negara, yang bagi Muhammadiyah dijiwai oleh semangat tauhid. Upaya ini tidak berjalan mudah karena PKI selalu berlindung di balik isu Nasakom dan selalu memperoleh dukungan kuat dari pemerintahan Soekarno.

**Era Orde Baru**, pada era ini situasinya berubah. Pemerintahan baru lebih mengedepankan kebijakan politik *developmentalisme*, yang melakukan

---

<sup>21</sup> Selengkapnya dapat dibaca pada bab.2 skripsi ini

<sup>22</sup> Diolah dari berbagai sumber

modernisasi di segala bidang kehidupan bangsa dan negara. Dengan dukungan Kabinet ahli dan Golongan Karya, Soeharto melaksanakan program pembangunan lima tahun yang disusun menurut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Masa ini dwi fungsi ABRI dihidupkan dan kekuasaan komunis disingkirkan sampai ke akar-akarnya.

Pada tanggal 16 Agustus 1982 Presiden Soeharto di depan sidang pleno DPR RI meminta Pancasila dijadikan sebagai satu-satunya asas bagi seluruh partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Pada tanggal 6 Maret 1983 keluarlah Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang GBHN yang mewajibkan Partai Politik dan Golongan Karya menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985. Kebijakan tersebut juga berlaku bagi semua organisasi kemasyarakatan, Situasi ini menimbulkan ketegangan dan reaksi yang cukup hebat terutama yang datang dari ormas-ormas keagamaan.

Gaya kepemimpinan Pak AR, begitu KH AR Fakhruddin biasa disapa, sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah saat itu, memiliki peran penting, yakni gaya kepemimpinan yang cukup luwes dalam menyatukan berbagai konflik pemikiran terkait dengan isu sensitif tersebut. Di depan semua hadirin di Muktamar Muhammadiyah ke 41 di Solo, Pak AR menyebutkan bahwa asas Pancasila itu diterima, “dengan ikhtiar”, yaitu dalam pengertian bahwa penerimaan tersebut disertai tekad untuk “*menegakkan kalimah Allah di*

*Indonesia ini. Tidak merusakkan peraturan-peraturan di Indonesia, tapi tidak menjual iman, tidak menjual agama.”*<sup>23</sup>

Sikap bijaksana tersebut ternyata cukup signifikan bagi keberlangsungan perjuangan persyarikatan. Era ini juga dapat disebut sebagai masa-masa kegemilangan Muhammadiyah di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial. Jumlah amal usaha di ketiga bidang tersebut mengalami peningkatan yang cukup pesat. Prestasi ini begitu mengesankan sehingga membuat Presiden RI saat itu, Pak Harto, berujar, ”*Sebagai orang yang pernah mengecap pendidikan Muhammadiyah, saya ikut mengharapkan agar Muhammadiyah tumbuh makin besar, makin kuat, dan makin banyak amalnya dalam bidang-bidang yang amat luas.*”

**Era Reformasi**, dukungan pemerintah pada era Orde Baru tersebut tentu sangat bermanfaat bagi persyarikatan Muhammadiyah. Akan tetapi, pada saat kekuasaan Orde Baru semakin menyimpang dari demokrasi, Muhammadiyah melalui Amien Rais, sebagai tokoh dan mantan Ketua Umum Muhammadiyah, maju mengingatkan Pak Harto dengan saran melakukan suksesi kepemimpinan. Sayangnya, saran tokoh reformasi yang diusulkan dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah di Surabaya Desember 1993 ini tidak direspon positif yang berakibat munculnya gelombang demonstrasi yang menjatuhkan rezim Orba.

**Pasca Reformasi**, Muhammadiyah telah memformatkan dirinya sebagai organisasi dakwah yang siap memasuki era globalisasi, antara lain dengan memelopori forum tingkat dunia dua tahunan yang disebut World Peace Forum (WPF) atau Forum Perdamaian Dunia yang pada akhir tahun lalu telah

---

<sup>23</sup><http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/03/28/sumbangan-muhammadiyah-dalam-mengawal-perjalanan-bangsa/>, diakses pada 3 Agustus 2017

diselenggarakan untuk keempat kalinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Din Syamsuddin, diharapkan dalam forum yang dihadiri oleh banyak tokoh dari beragam latar belakang itu dapat menghasilkan suatu solusi atas permasalahan dunia dalam konteks demokrasi dan multikulturalisme.

Pada masa ini pula Muhammadiyah banyak melakukan gerakan pencerahan yang berkemajuan, tentunya dalam konteks kebangsaan. Sebut saja Jihad Konstitusi, Jihad konstitusi merupakan gerakan pembaruan di bidang hukum dan upaya korektif yang dilakukan melalui jalur formal, yakni dengan mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Bagi Muhammadiyah, jihad konstitusi sangat penting untuk mewujudkan cita-cita agar bangsa ini berjalan ke arah yang semestinya. Apalagi, sejumlah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR RI dinilai ada yang meleceng dari cita-cita awalnya.

Salah satu hasil dari jihad konstitusi ini, misalnya saat MK membatalkan seluruh pasal tentang kedudukan, fungsi, dan tugas Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Pembatalan itu tertuang dalam Surat Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tertanggal 13 November 2012. MK menganggap keberadaan BP Migas inkonstitusional sehingga pasal tersebut harus dibubarkan. Din Syamsuddin bersama 12 ormas Islam lainnya meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengabulkan uji materi mengenai kedudukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) pada UU 22/2001 tentang Migas. *“Muhammadiyah dan segenap orang dan pemohon akan terus melakukan kajian, pengawalan termasuk memberikan sumbangan pemikiran untuk pemerintah dan DPR ... perjuangan untuk menegakkan konstitusi ini kami sebut jihad dan akan segera kami tindak lanjuti dengan melakukan gugatan ke*

*pihak-pihak lain yang kami yakini merugikan rakyat,*<sup>24</sup> kata Din Syamsuddin ketika itu.

Misalnya juga tentang fiqh air yang Pelestarian sumber daya air menarik perhatian Muhammadiyah. Dalam *Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Tarjih* sejak 28 Februari hingga 2 Maret 2014 lalu, *Muhammadiyah* menetapkan panduan fiqh tentang air, terutama bagaimana melestarikan sumber daya alam ini.

Muhammadiyah melalui majelis tarjih menganggap bahwa masih belum muncul kesadaran menyeluruh dari masyarakat mengenai dampak buruk pembuangan limbah ke aliran sungai. Tak heran, sungai yang bisa merupakan sumber air akhirnya tercemar. Padahal, keberadaan air ini sangat berarti bagi manusia. Bahkan semakin hari kian banyak limbah, industri, dan rumah tangga yang menggelontor dari rumah penduduk dan pabrik ke sungai. Padahal, sungai pernah menjadi bagian dari perkembangan peradaban Islam dan dunia. Misalnya saja sungai Nil di Mesir.<sup>25</sup>

### **3. Islam Berkemajuan di tengah wacana gerakan Islam di Indonesia**

Pasca reformasi, Indonesia telah memasuki suatu alam yang baru dalam kehidupan kebangsaannya. Dimana globalisasi menyebabkan revolusi dalam teknologi telekomunikasi dan transportasi, akibat dari revolusi itu dimensi jarak dan waktu kian lama menjadi kabur dan sedikit demi sedikit menghilang. Globalisasi ini menyebabkan masyarakat Indonesia secara mudah

---

<sup>24</sup>*Ibid*

<sup>25</sup><http://tarjih.muhammadiyah.or.id>

mengakses dan berinteraksi dengan “dunia luar”, terutama dalam hal budaya dan pemikiran.

Kita dapat melihat misalnya ketika konflik Sunni dan Syiah di Suriah, pengaruhnya merembet ke Indonesia dengan munculnya gerakan anti-Syiah dengan nama Aliansi Nasional Anti-Syiah (ANNAS). Juga ketika deklarasi ISIS yang menjadikan Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai khalifah, Indonesia turut geger dengan sejumlah orang Indonesia yang turut deklarasi atau melakukan baiat di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.

Belum lagi kita melihat bagaimana penetrasi gerakan transnasional seperti Hizbut Tahrir ke Indonesia (yang kemudian disebut HTI). Hizbut Tahrir adalah gerakan politik yang berupaya untuk membebaskan palestina dan dunia Islam pada umumnya.<sup>26</sup> Didirikan oleh Taqiyuddin al-Nabhani pada tahun 1953 di Yerussalem, Palestina.<sup>27</sup>

Di Indonesia<sup>28</sup>, Hizbut Tahrir sebenarnya baru muncul ke permukaan pada Mei tahun 2000, ketika menyelenggarakan konferensi Internasional tentang Khilafah di Lapangan Tenis Indoor, Senayan. Konferensi ini tentu saja untuk

---

<sup>26</sup> Syamsu Rizal, “Jaringan Hizbut Tahrir di Kota Makassar Sulawesi Selatan”, dalam Ahmad Syafi’i Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011, hal 10

<sup>27</sup> Secara sosio-historis pendirian HT adalah karena berawal dari pencaplokan Israel atas Palestina pada tahun 1948, ini membuat Al-Nabhani kehilangan tanah air dan pindah ke negara lain. Ini menyadarkan dirinya bahwa Islam sangat lemah dihadapan Israel dan Barat. Ditambah lagi karena kesadaran terpecahnya umat Islam pasca runtuhnya kekhilafahan Turki Usmani pada tahun 1924.

<sup>28</sup> HT masuk ke Indonesia pada tahun 1982. Dibawa oleh Abdurrahman al-Baghdadi dan Abdullah bin Nuh.

mengenalkan ide, program dan pimpinan HTI. Aktivitas HTI terutama dalam aksi demonstrasi sering menghiasi halaman media cetak dan menjadi berita utama media elektronik. Konferensi internasional kedua tentang khilafah kemudian dilaksanakan pada tahun 2007 dengan tema “Saatnya Khilafah Memimpin Dunia”. Perhelatan akbar ini juga mengundang tokoh-tokoh nasional, termasuk juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ketika itu, Din Syamsuddin.

Terkait kepentingannya di Indonesia, HTI mendesak pemberlakuan syariat Islam sebagai solusi bagi persoalan yang menimpa Indonesia. Jika pada tatanan global mereka mengusung wacana “Khilafah Islamiyah”, maka di Indonesia, HTI mengusung slogan “Selamatkan Indonesia dengan Syari’at Islam”. Menurut HTI, hanya sistem khilafahlah yang layak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh. Dari sebuah negara khilafah inilah, diharapkan terjadi reunifikasi seluruh dunia Islam.<sup>29</sup>

Tentu saja bagi sebagian masyarakat Indonesia, isu khilafah ini adalah sesuatu yang menarik untuk dibicarakan. Karena membuat umat Islam kembali bernostalgia dengan kejayaan umat Islam pada masa kekhilafahan.

Atas peristiwa transnasional di ataslah, kita dapat melihat bagaimana dua gerakan yang lahir dari Islam Indonesia merespon ketika Muktamar masing-masing pada tahun 2015 lalu. Muhammadiyah dan NU mengangkat tema yang sekilas mirip, Muhammadiyah mengangkat tema, “Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan” dan NU, “ Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia”. Meski terlihat bersinggungan, namun “Islam Berkemajuan” dan “Islam Nusantara” adalah respons yang berbeda terhadap

---

<sup>29</sup> Hizbut tahrir Indonesia, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*, Hizbut Tahrir Indonesia, 2009, hal 9-12



fenomena yang sama, yaitu globalisasi, terutama globalisasi kebudayaan, baik dalam bentuk Arabisasi ataupun Westernisasi.<sup>30</sup>

Kedua tema atau wacana dua gerakan Islam ini sebenarnya tidak perlu dibenturkan sebagaimana yang dilakukan oleh banyak pihak. Karena respon terhadap pengaruh globalisasi inilah yang membuat Muhammadiyah dan NU secara tidak langsung menjadikan identitas kebangsaan sebagai konsensus dan pertemuan pemikiran wacana Islam Berkemajuan dan Islam Nusantara.

Lantas dalam konteks kebangsaan, bagaimana kita memahami “Islam Nusantara” *vis a vis* “Islam Berkemajuan”?

Muhammadiyah memandang bahwa segenap umat Islam harus berkomitmen menjadikan Negara Pancasila sebagai *dâr al-syahâdah* atau tempat bersaksi dan pembuktian diri dalam mengisi dan membangun kehidupan kebangsaan. Dalam Negara Pancasila sebagai *dâr al-syahâdah*, umat Islam harus siap bersaing untuk mengisi dan memajukan kehidupan bangsa dengan segenap kreasi dan inovasi (*tajdid*) yang terbaik. Dalam hal ini, Muhammadiyah sebagai komponen strategis umat dan bangsa mempunyai peluang yang besar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.<sup>31</sup>

Najib Burhani melihat wacana dari dua ormas terbesar di Indonesia tersebut sebagai bentuk respon yang berbeda terhadap fenomena yang sama, yakni globalisasi. Islam Nusantara ia gambarkan sebagai “langgamnya Nusantara, tapi isinya Islam. Bajunya Indonesia, tapi badannya Islam”, adalah manifestasi dari

---

<sup>30</sup>Baca selengkapnya di Ahmad Najib Burhani, *Muhammadiyah Berkemajuan*, Bandung: Mizan, 2016, hal. 57

<sup>31</sup> Selanjutnya anda dapat membaca pandangan kebangsaan Muhammadiyah pada halaman 61-64 bagian pembahasan ini

sikap menghadapi globalisasi dengan indigenisasi, menekankan keunikan budaya. Sedangkan Muhammadiyah menurut Najib menekankan pada universalisme dan kosmopolitanisme dalam menanggapi globalisasi. Najib pada akhirnya memposisikan wacana Islam polarisasi antara NU yang tradisional dan Muhammadiyah yang modernis di tahun 1920-an.<sup>32</sup>

Dibanding upaya Najib yang melihat dua wacana tersebut sebagai respon terhadap globalisasi memang berhasil menawarkan potret sosiologis terhadap fenomenanya, Akhmad Sahal justru melihatnya dari perspektif *ushul fiqh*. Menurutnya, kedua wacana tersebut justru merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama, yakni Kontekstualisme Islam. Baik Islam Nusantara maupun Islam Berkemajuan sama-sama mempertimbangkan perubahan situasi dan kondisi masyarakat, dengan menjadikan prinsip kemaslahatan sebagai tolok ukurnya. Islam Nusantara menekankan pembaruan Islam karena perubahan konteks geografis (dari Arab ke Nusantara), sedangkan Islam Berkemajuan menyerukan pembaruan Islam karena perubahan zaman yang menuntut pembaruan (*tajdid*).<sup>33</sup>

Titik temu kontekstualisasi Islam versi Muhammadiyah dan NU setidaknya tercermin dalam pemikiran Prof. Amin Abdullah dan KH. Sahal Mahfudh tentang hukum Islam. Bagi Amin Abdullah, transformasi besar-besaran dalam tatanan sosial, politik, ekonomi, budaya dan ilmu pengetahuan yang secara dramatis mencerminkan perubahan radikal dari zaman klasik-skolastik ke era modern menuntut digelakkannya ijtihad kontemporer, bahkan ijtihad yang segar (*fres*

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hal 57-61

<sup>33</sup>Akhmad Sahal, "Kenapa Islam Nusantara", dalam Akhmad Sahal, Munawir Aziz dkk, *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*, Mizan: Bandung, 2010, hal 28

*ijtihad*). Dalam pandangan Amin, Fikih Sosial dan Kalam Sosial perlu berintegrasi dan berinterkoneksi dengan sains dan harus memiliki *world view* yang terbuka. Jika tidak ingin kembali pada era pertengahan, maka hasil ijtihad harus selalu terbuka untuk menerima hal-hal yang lebih baik dalam kehidupan manusia di dunia ini. Inilah yang disebut Amin Abdullah sebagai Fikih Sosial dan Kalam Sosial di alam modern dan postmodern.<sup>34</sup>

Konsepsi Amin Abdullah tentang Fikih dan Kalam Sosial menunjukkan adanya kemiripan dengan ide “fikih sosial” KH. Sahal Mahfudh. Bagi Kiai Sahal, asumsi dasarnya, syariat mesti dilihat sebagai fikih, yang berarti “pemahaman”. Fikih harus mampu menampilkan dinamisme dan fleksibilitasnya berhadapan dengan perubahan sosial yang melaju kencang. Bagi Kiai Sahal, fikih selalu merupakan hasil ijtihad yang tak bersifat kaku dan sakral, melainkan lentur dan kontekstual. Putusan fikih yang pada suatu zaman dan tempat tertentu dianggap valid bisa saja tak lagi relevan di era lain atau tempat lain.<sup>35</sup>

Dengan kata lain, keduanya (Muhammadiyah dan NU) justru menyuarakan semangat yang sama, yakni pemahaman hukum Islam yang dinamis dan kontekstual. Kemiripan antara pemikiran fikih kontekstual yang dilontarkan Amin Abdullah dan KH. Sahal Mahfudh diatas barangkali bisa kita katakan

---

<sup>34</sup> Baca tulisan Amin Abdullah, “Fiqh dan Kalam Sosial Kontemporer: Perjumpaan Ulum al-Din dan Sains Modern Menuju Fresh Ijtihad”, <http://digilib.uin-suka.ac.id>, diakses 2 Agustus 2017

<sup>35</sup>KH. Sahal Mahfudh, “Bahtsul Masaail dan Istinbath Hukum NU”, <http://www.nu.or.id/post/read/7199/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu>, diakses 2 Agustus 2017

mencerminkan kemiripan dari sisi lain antara Islam Berkemajuan Muhammadiyah dan Islam Nusantara NU.

Dalam hal paham kebangsaan misalnya, kita tentu tidak menemukan (secara substantif) perbedaan antara Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan. Keduanya, baik Muhammadiyah maupun NU sama-sama tidak menginginkan Negara Pancasila digantikan Negara Islam seperti yang dibawa oleh HTI. Hal ini dapat dibuktikan secara historis, NU dan Muhammadiyah turut berperan besar dalam mendirikan Negara ini. Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh PBNU pada tahun 1945 kiranya patut di sandingkan dengan pemahaman Din Syamsuddin yang mengatakan Indonesia sebagai Negara Perjanjian dan Negara Kesaksian (*Dar Al-Ahdi Wa Al-Syahadah*).

Alih-alih melihat jargon Islam Berkemajuan dan Islam Nusantara sebagai berlawanan satu sama lain, penulis melihatnya sebagai dua konsepsi yang layak disinergikan. Dengan demikian, Islam Nusantara yang dikembangkan NU siap untuk mengapresiasi spirit pembaruan dari Islam Berkemajuan. Pun juga dengan Islam Berkemajuan yang dipromosikan Muhammadiyah bersedia menghargai dimensi kemaslahatan berbasis tradisi setempat yang mencerminkan ide Islam Nusantara.